

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa proses hegemoni yang dilakukan dari kolaborasi antara MNCs dan Indonesia dibagi menjadi beberapa poin penting yang dianggap ketika sudah dapat diterima oleh kaum yang didominasi dalam hal ini adalah buruh secara tidak sadar, maka hegemoni telah berhasil dilakukan. Namun, prosesnya tidak akan bisa berjalan tanpa adanya jembatan antara kedua belah pihak untuk mendominasi kaum buruh. Oleh karena itu, bagi Gramsci berjalannya hegemoni tidak hanya bisa dilakukan oleh negara yang selama ini dikenal dengan *Ruling Class* melainkan bisa dilakukan oleh seluruh kelas sosial. Dan intelektual organik inilah yang sebenarnya menanamkan ide, menjadi bagian dari penyebaran ide-ide yang ada di masyarakat dari kelas yang berkuasa, serta turut aktif dalam membentuk masyarakat yang diinginkan.

Kaum intelektual yang dimaksud oleh Gramsci ini dibentuk tidak hanya untuk memahami struktur produksi namun mampu untuk memahami bidang sosial dan politik. Karena MNCs akan menciptakan beberapa pihak untuk berada disampingnya yang ahli di dalam bidang ekonomi politik, memahami perubahan budaya dan juga sistem yang legal. Yang perlu ditegaskan bahwa MNCs merepresentasikan level tertinggi dari elaborasi sosial. Hal tersebut dilakukan agar kapasitas MNCs menjadi lebih luas meskipun tetap fokus ke dalam produksi ekonomi. Dengan adanya hal tersebut, MNCs dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap bisnisnya dan konsumen terhadap produknya.

Tetapi dalam hal ini, MNCs tidak selalu merekrut kaum elit tetapi juga merekrut kaum non elit, di dalam prosesnya kaum elit lebih memahami lingkup dan

bidangnya karena merekalah yang menjadi kepercayaan investor dalam menjalankan bisnisnya. Sedangkan untuk kaum non elit lebih memahami berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat pada daerahnya, seperti aspek demografi, nilai-nilai yang dianut, norma yang dijalankan bahkan sampai kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk setempat. Penduduk yang telah terbiasa tinggal di lokasi tersebut yang nantinya akan dijadikan objek hegemoni. Dalam kasus yang sering ditemui adalah pada saat investor ingin membuat sebuah usaha di suatu lokasi yang baru, maka yang akan di rekrut untuk menjadi pendamping dalam pengembangan bisnis adalah beberapa penduduk setempat. Sehingga para perusahaan tersebut dapat lebih mudah dan cepat untuk memahami karakteristik lokasi tempat mereka melakukan produksi ekonomi. Kaum intelektual tersebut yang akan menjadi jembatan antara perusahaan dan negara dalam kolaborasinya untuk menjalankan sebuah bisnis. Pada proses pelaksanaan kolaborasi tersebut kaum intelektual akan menjadi motor untuk melaksanakan kegiatan operasional agar bisnis dapat berjalan dengan lebih mudah. Kaum intelektual organik ini mempunyai suatu keharusan yaitu berani berangkat dari kenyataan yang ada di masyarakat dan mereka harus menjadi orang yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat serta menanamkan kesadaran menyingkap kebobrokan sistem lama dan dapat mengorganisir masyarakat.

Adapun lima tahapan proses kolaborasi antara Nike dan Indonesia untuk menciptakan hegemoni terhadap kaum buruh. Pertama yaitu norma, apabila suatu norma telah disepakati bersama untuk dijalankan, maka akan lebih mudah untuk menyatukan kerangka pemikiran dari para kaum buruh untuk berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kedua yaitu nilai, yang harus diperhatikan oleh perusahaan ketika perusahaan berdiri. Nilai kemanusiaan harus menjadi sorotan utama sebuah perusahaan untuk melindungi para buruhnya agar tetap

bekerja tanpa adanya perlawanan atau tuntutan akan haknya sebagai manusia. Hal tersebut diaplikasikan kedalam sebuah pelatihan kepada para buruh di perusahaan PT. Nikomas Gemilang yang telah dipercaya oleh Nike untuk membuka pabriknya disini. Untuk melindungi para buruhnya terhadap tingkat kepercayaan kepada perusahaan tempat mereka bekerja, PT Nikomas Gemilang dan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melakukan kolaborasi untuk melakukan pelatihan hak buruh perempuan dan perlindungan maternitas. Yang dimana pelatihan ini menjadi hal yang tentunya sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk dapat mengerti dan mengetahui hak-hak pekerja perempuan. Dengan adanya hal tersebut, secara tidak langsung dilakukan penanaman citra baik perusahaan bahwa mereka peduli akan hak-hak para pekerja, terutama hak pekerja kaum wanita. Ketiga yaitu impulsif, dimana para HRD dari perusahaan Nike Inc akan membuka peluang kerja secara besar-besaran sehingga menciptakan minat dari para buruh pendatang untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut.

Keempat yaitu tekanan, yang merupakan suatu desakan atau paksaan yang mengakibatkan para buruh dapat tertindas. Dalam hal ini para buruh Nike dipaksa bekerja satu jam ekstra setiap hari dan memiliki target produksi yang dibebankan terlalu berlebihan kepada mereka. Kelima yaitu, peraturan dan hukuman yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Peraturan ini diciptakan untuk membuat buruh patuh terhadap aturan yang diberlakukan oleh perusahaan. Apabila peraturan tersebut tidak dijalankan dengan semestinya para buruh akan mendapatkan sebuah hukuman dari tempat perusahaan mereka bernaung, dalam kasus ini yaitu Nike. Nike hanya membayar para buruh yang dipekerjakannya dengan jumlah buruh yang sangat besar dengan nominal 30 pence/jam. Jika 100 pence setara dengan 1 pounds mata

uang Inggris, artinya buruh yang bekerja selama ini hanya dibayar Rp5.642 per jam. Jika buruh tersebut bekerja selama 8jam sehari, dan masuk kerja selama lima hari dalam seminggu, mereka hanya mengantongi gaji sebesar Rp1,26 juta tiap bulan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Gaji tersebut diberlakukan oleh Nike disebabkan Upah tersebut ditetapkan oleh Nike seiring dengan upah minimal regional (UMR) yang ditetapkan oleh otoritas berwenang di Indonesia. Para buruh pun kebanyakan hanya diam dan mengikuti aturan yang diberlakukan, karena takut diberi hukuman oleh Nike jika melakukan perlawanan.

Apabila dari kelima poin tersebut telah berhasil diterapkan oleh MNCs kepada kaum buruh Nike, maka objek hegemoni telah berhasil dikendalikan. Dan usaha diatas tidak akan berhasil tanpa adanya kolaborasi dari kedua belah pihak, yang dalam hal ini Nike dan Pemerintah Indonesia. Pada tahapan proses hegemoni inilah dapat dipahami bahwa untuk melakukan sebuah hegemoni haruslah mencakup sebuah variabel penting. Dan dengan adanya hal tersebut buruh-buruh pun tidak sadar kalau mereka telah dihegemoni oleh MNCs karena kaum buruh merasa terfasilitasi oleh keberadaan Nike ini sehingga mereka memberikan persetujuan pada Nike dan tidak merasakan bahwa mereka terkeksplotasi. Padahal, dalam kenyataannya mereka tereksplotasi karena keuntungan yang perusahaan dapatkan akan diberikan kepada MNCs untuk dibawa kembali ke negara induk MNCs yang bersangkutan. Selanjutnya, perlu disadari bahwa penulis dalam skripsi ini memiliki beberapa kekurangan karena keterbatasan instrument penelitian hanya pada studi pustaka. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran guna menunjang karya tulis ini menjadi lebih baik. Penulis juga menaruh harapan agar karya tulis ini dapat diteliti lebih lanjut sehingga memberikan wawasan baru bagi generasi selanjutnya.